

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Fitriani. 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Anggota Dewan terhadap Pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Se- Karesidenan Surakarta). Artikel Publikas. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto, S. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christin Jois Karubaba. 2017. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating di Kabupaten Nabire. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Depdikbud. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dobell, Peter dan Martin Ulrich. 2002. Parliament's performance in the budget process: A case study. Policy Matters 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>.
- Elsi Arianti. 2017. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan). JOM UNRI Fakultas Ekonomi. ISSN: 2355-6854. Volume 4, No. 1.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- \_\_\_\_\_. 2011. Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- \_\_\_\_\_. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Iqbal Hasan. 2009. Analisis Data Penelitian Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Nusatam.
- Manginte, dkk. 2015. Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). SNA XVI II.
- Manullang. 1997. Dasar Manajemen. Edisi ke-6. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Mardiasmo. 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Yogyakarta: Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM.
- \_\_\_\_\_. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayasari, Rosalia. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Universitas Tridianti Palembang.
- Novatiani, R Ait. dan Nurmalita Lestari. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung. Jurnal Widyatama Repository.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Keppres No. 74 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi

- Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sisk, Timothy D. 2002. Demokrasi ditingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan, Seri 4. Internasional IDEA, Jakarta, hal. 189.
- Sopannah. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- \_\_\_\_\_. 2004. Menyoal Anggaran Publik, dalam Pesangon Gate, Bulletin Suara Korban. Malang Corruption Watch (MCW), Edisi 1 Maret 2004.
- \_\_\_\_\_. 2009. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Malang Corruption Watch (MCW), SNA XIII.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tri Hartanto. 2018. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2009. Pengaruh *Personal Background, Political Background*, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 2006). Universitas Sebelas Maret, SNA X.
- Yudoyono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela/jendela3.htm>.